KATALOG BPS: 9302020.3579



KATALOG BPS: 93020.



MENURUT PENGELUARAN

2018 - 2022



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU

PRODUKDOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BATU MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF BATU MUNICIPALITY BY EXPENDICTURE 2018-2022

Nomor Publikasi/ Publication Number: 35790.2306

Katalog BPS/ BPS Catalogue: 9302020.3579

Ukuran Buku/ *Book Size*: 21,5 cm x 29,7 cm Jumlah halaman/ *Total pages*: x+ 65 halaman

Naskah/*Script*:

Badan Pusat Statistik Kota Batu BPS Statistics of Batu Municipality

Desain Gambar Kulit/Cover Design: Badan Pusat Statistik Kota Batu BPS Statistics of Batu Municipality

Sumber Ilustrasi Gambar Kulit/Source of Cover Ilustration: Badan Pusat Statistik Kota Batu BPS Statistics of Batu Municipality

Diterbitkan Oleh/Published By:

© Badan Pusat Statistik Kota Batu/
BPS Statistics of Batu Municipality

Dicetak Oleh/Printed By:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Pengarah/Director:

Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng

Penanggungjawab Umum/General in Charge:

Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng

Penyunting/Editor:

Ir. Yuniarni Erry Wahyuti, MM

Penulis/Writer:

Ir. Yuniarni Erry Wahyuti, MM

Gambar Kulit/Cover Design:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik / Regional Account and Statistical Analysis Division

nites: Illoatukota la persona de la persona

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas tentang PDRB menurut pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Batu, April 2023 KEPALA BADAN PUSAT STATJSTIK

Kota Batu.

Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng

nites: Illoatukota la persona de la persona

DAFTAR ISI CONTENTS LIST

KATA	A PENG	ANTAR	V
DAF	TAR ISI		vii
DAF	TAR TA	BEL	viii
DAF	ΓAR GR	AFIK	ix
DAF	TAR LA	MPIRAN	x
i.	PEND	AHULUAN	1
	1.1	Pengertian PDRB	3
	1.2	Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	6
ii.	METO	DDE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
	2.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
	2.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	
		(PK-LNPRT)	15
	2.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	16
	2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
	2.5	Perubahan Inventori	21
	2.6	Ekspor – Impor	24
III.	TINJA	NUAN PEREKONOMIAN KOTA BATU MENURUT PDRB PENGELUARAN 2018-	
	2022		25
	3.1	Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
	3.2	Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	34
IV.	PERK	EMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA BATU TAHUN 2018-	43
	2022.		
	4.1	PDRB (Nominal)	45
	4.2	Poporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	46
	4.3	Incremental Capital Output (ICOR)	46
V.	PENU	TUP	49
VI.	LAME	PIRAN	53

DAFTAR TABEL

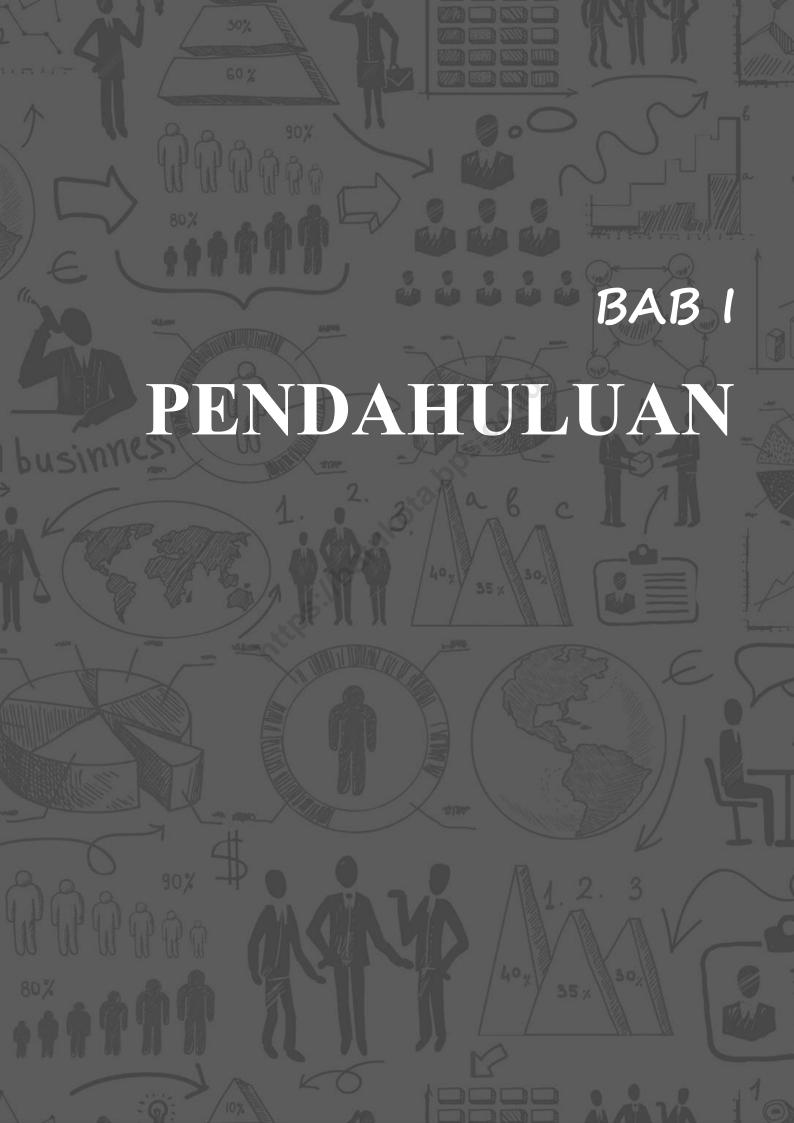
		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan	
	2010	9
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018-2022 (Miliar Rupiah)	28
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)	29
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022(%)	31
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022(%)	32
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018–2022.	33
Tabel 3.6	Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2021	34
Tabel 3.7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga, Kota Batu 2018 – 2022	35
Tabel 3.8	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kota Batu 2018- 2022	37
Tabel 3.9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Batu 2018 – 2022	38
Tabel 3.10	Perkembangan dan Struktur PMTB, Kota Batu 2018 – 2022	40
Tabel 3.11	Perkembangan Perubahan Inventori Kota Batu 2018 – 2022	41
Tabel 3.12	Perkembangan Net Ekspor, Kota Batu 2018 – 2022	42
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kota Batu 2018 – 2022	45
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kota Batu 2018 – 2022	46
Tabel 4.3	Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kota Batu 2018 – 2022	47

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018-2022 (Miliar Rupiah)	28
Grafik 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)	29
Grafik 3.3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022(Miliar Rupiah)	30
Grafik 3.4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022	31
Grafik 3.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022	32
	Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022	

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	55
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	56
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	57
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	58
Lampiran 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	59
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 – 2022	60



https://patukota.bps.go.id

1.1

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itumenggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batasbatas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian, PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh

-

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

$Y = C + GFCF + \Delta Inventori + X - M$

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah

^{3. -} Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

⁻ Disebut sebagai pendekatan "riil"

⁻ Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

yang berbeda disebut sebagai "output akhir (*final output*)". Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

Y (Income) = PDRB Produksi

C (Consumption) = Konsumsi akhir

GFCF (Gross Fixed Capital Formation) = Pembentukan Modal Tetap Bruto

 Δ Inventori = Perubahan Inventori

X = Ekspor M = Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2

Perubahan Tahun Dasar PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Batu menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh padapola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

• Konsep dan Cakupan

- A. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- B. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- C. Penelitian dan pengembangan (*research and developmentl RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- D. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- E. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- F. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- G. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- H. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dansuku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metodelmputed *Bank Services Charge* (*IBSC*).

Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2013.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2000 dan 2010

	PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	Household Consumption		Household Consumption
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
	Government Expenditure		Non-Profit Institution Consumption
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
	Gross Fixed Capital Formation		Government Expenditure
4.	Perubahan Inventori	4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	Change in Inventories		Gross Fixed Capital Formation
5.	Ekspor/ <i>Export</i>	5.	Perubahan Inventori
6.	Impor/ <i>Import</i>		Change in Inventories
		6.	Ekspor/ <i>Export</i>
		7.	Impor/ Import

ntips://psilledia.pps.go.id

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

ntips://psilledia.pps.go.id

2.1

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, yaitu:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- 3. Pakaian dan alat kaki
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- 5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
- 6. Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- 10. Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, dalam publikasi ini 12 COICOP tersebut diklasifikasikan kembali ke dalam 7 COICOP yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- 3. Perumahan, Perkakas, PereIngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas), BPS
- b. Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- c. Sensus Penduduk 2010, BPS
- d. Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

- 1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
- 2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
- 3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- 4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- 5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Atas Dasar Harga Berlaku);
- 6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
- 7. Nilai PK-RT Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2

Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha.LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

D. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

- 1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
- 2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
- 3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
- 4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Atas Dasar Harga Berlaku);
- 5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- 6. Nilai PK-LNPRT Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.



Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)

A. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

B. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

- Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
- 2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

C. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Batu mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu.

PK-P Kota Batu mencakup PK-P desa/kelurahan yang ada di wilayah Kota Batu, PK-P Kota Batu yang bersangkutan, dan PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Batu.

D. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Batu tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

E. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kota BatuTahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P Atas Dasar Harga Berlaku =

Output non pasar – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market*production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja pengadaaan barang/jasa, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

- 1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- 2. PK-P Atas Dasar Harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P Atas Dasar Harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan	
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional	
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional	
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB		
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional	
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat	
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat	
Output BI		Neraca Jasa	

2.4

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

B. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

C. Cakupan

PMTB mencakup:

a. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

- b. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

D. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

E. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB Atas Dasar Harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB Atas Dasar Harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x

Indeks Produksi (t)



Perubahaan Inventori (PI)

A. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

B. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan

inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

- 1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- 2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- 3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- 4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- 5. Data komoditas perkebunan;
- 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;

8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

E. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI Atas Dasar Harga Berlaku =

Volume nventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit PI Atas Dasar Harga Konstan = PI Atas Dasar Harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI Atas Dasar Harga Konstan =

Inventori (t)Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t)- Inventori (t-1)Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI Atas Dasar Harga Berlaku =

PI Atas Dasar Harga Konstanx IHPB rata-rata (t)

2.6 Ekspor-Impor

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas eksporimpor dari dan kesuatu wilayah.

B. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

C. Cakupan

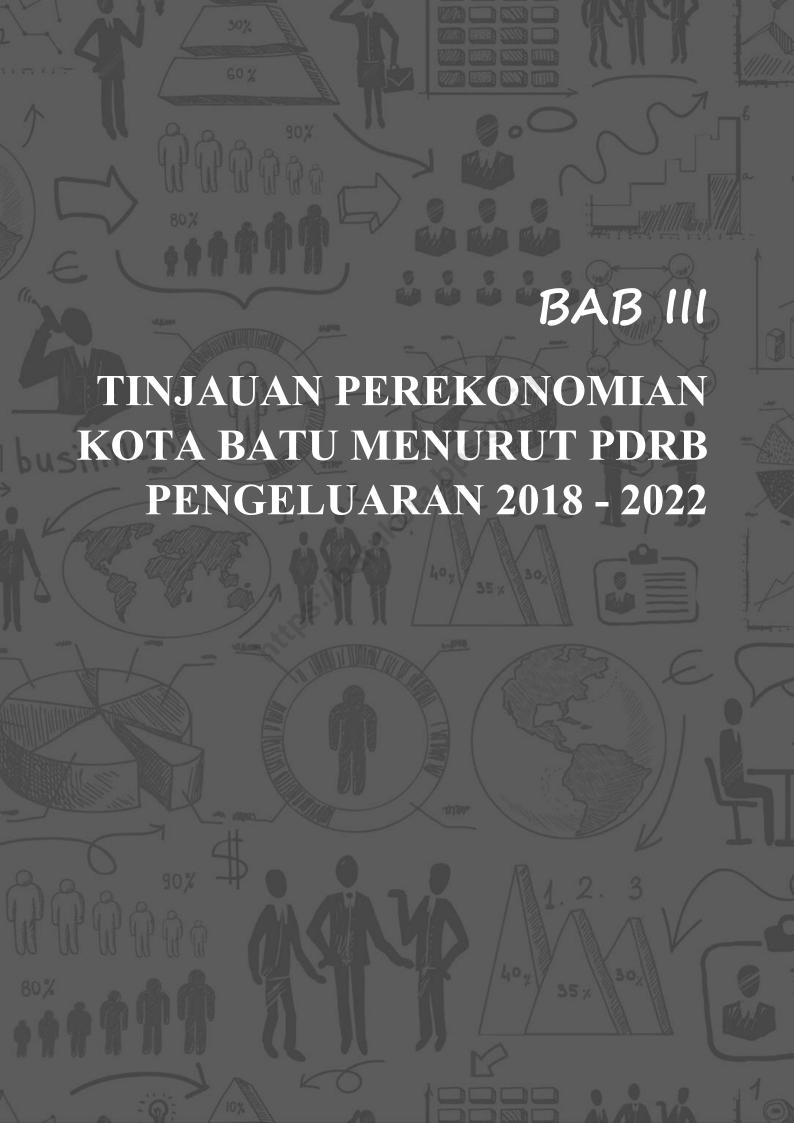
Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Batu terdiri dari:

- a. Ekspor keluar Provinsi Jawa Timur/Kota Batu
- b. Impor dari luar Provinsi Jawa Timur/Kota Batu.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

D. Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Batu didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan Konsep dan Definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Batu diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metode tidak langsung.



3.1

Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Batu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2022 naik sebesar 10,37 persen, yakni dari 16.841,1 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 18.587,60 milliar rupiah pada tahun 2022. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka nominalnya lebih kecil, yakni dari 11.471,4 miliar rupiah (2021) menjadi 12.180,93 miliar Rupiah (2022), atau naik sebesar 6,18 persen.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia, perekonomian Indonesia yang mengalami kelesuan mulai membaik sedikit demi sedikit, tidak terkecuali di Kota Batu. Perekonomian Kota Batu periode pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -6,46 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah di Jawa Timur. Namun, pada tahun 2021 perekonomian Kota Batu mulai tumbuh hingga 4,04 persen hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota batu mencapai 6,18 persen. Kenaikan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan positif terjadi hampir di seluruh kategori, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan yang naik hingga 13,32 persen. Dari sisi permintaan akhir, Pengeluaran Konsumsi LNPRT masih tumbuh positif paling tinggi yaitu 7,12 persen setelah itu pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga naik hingga 6,64 persen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami kenaikan hingga 0,25 persen; P; yang lain mengalami pertumbuhan sekitar 4 persen. Nilai PDRB ADHB Kota Batu selama kurun waktu 2018–2022 cenderung mengalami peningkatan, dari sebesar 15.640,89 miliar rupiah pada tahun 2018, terus meningkat menjadi 18.587,60 miliar rupiah pada tahun 2022. Meskipun demikian ketika Pandemi Covid melanda dunia (2020) PDRB ADHB mengalami penurunan hingga 15.917 miliar rupiah dari 16.925 miliar rupiah (tahun 2019).

Perubahan nilai PDRB ADHB ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Pada tahun 2018-2022 umumnya terjadi kenaikan volume permintaan, diiringi dengan kenaikan harga, sehingga menyebabkan meningkatnya nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Adapun pada tahun 2020, permintaan turun cukup signifikan, sehingga banyak produsen menurunkan harga untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut mengakibatkan nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

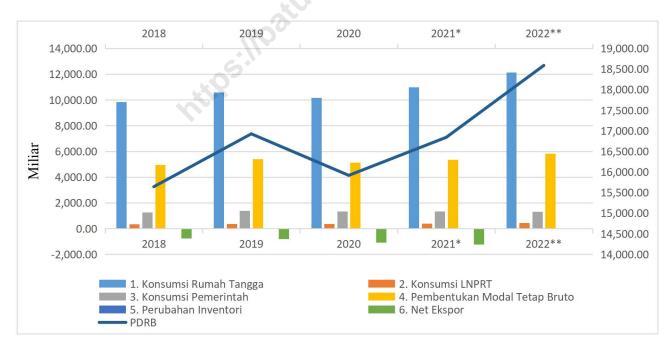
Perubahan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Batu pada periode 2018 - 2022 dapat dilihat dari Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9.841,54	10.580,16	10.177,26	10.990,83	12.311,31
2. Konsumsi LNPRT	335,37	368,03	375,39	386,68	436,89
3. Konsumsi Pemerintah	1.267,82	1.379,98	1.230,09	1.291,82	1.301,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.948,72	5.401,97	5.119,69	5.343,21	5.819,13
5. Perubahan Inventori	0,71	0,76	0,46	0,53	0,86
6. Net Ekspor	-753,27	-805,91	-986,10	-1.171,93	-1.282,42
PDRB	15.640,89	16.924,99	15.916,80	16.841,14	18.587,60

^{*)} Angka Sementara

Grafik 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)



^{*)} Angka Sementara

selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang

^{**)} Angka Sangat Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

perubahan PDRB secara volume atau kuantitas, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batu pada periode 2018 - 2022 dapat dilihat dari Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.021,98	7.366,81	7.077,87	7.403,29	7.894,72
2. Konsumsi LNPRT	183,04	196,60	197,78	200,81	215,10
3. Konsumsi Pemerintah	803,83	854,12	806,67	808,69	849,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.536,25	3.792,58	3.545,43	3.618,03	3.777,16
5. Perubahan Inventori	0,68	0,72	0,43	0,46	0,75
6. Net Ekspor	-479,79	-424,17	-602,36	-559,85	-555,85
PDRB	11.065,99	11.786,65	11.025,81	11.471.43	12.180,93

^{*)} Angka Sementara

Grafik 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 - 2022



^{*)} Angka Sementara

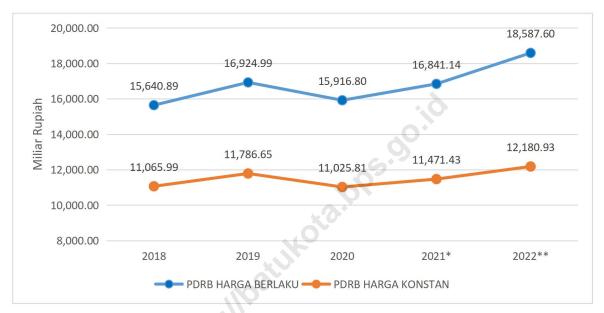
Dari Tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Batu mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 ekonomi mulai tumbuh kembali yakni menjadi

^{**)} Angka Sangat Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

11.471 miliar rupiah dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 12.180,93 Miliar. Sedangkan dari Grafik 2, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis pada pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Batu mulai tumbuh di kisaran 4 persen. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Batu mencapai 6,18 persen.

Grafik 3.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)



^{*)} Angka Sementara

Dari Grafik 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2022.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

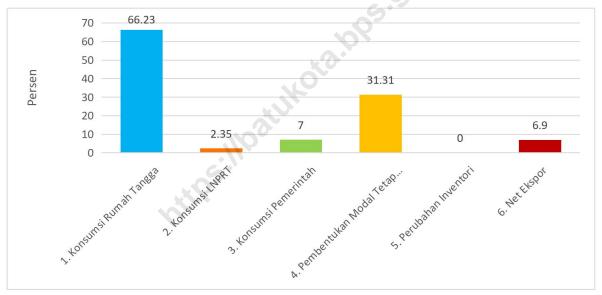
^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	62,92	62,51	63,94	65,26	66,23
2. Konsumsi LNPRT	2,14	2,17	2,36	2,30	2,35
3. Konsumsi Pemerintah	8,11	8,15	7,73	7,67	7,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,64	31,92	32,17	31,73	31,31
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Net Ekspor	-4,82	-4,76	-6,20	-6,96	-6,90
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

Grafik 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 - 2022 (%)



Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.4 terlihat bahwa selama periode 2018 - 2022, PDRB Kota Batu sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga memiliki kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 31,31 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 7 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Di sisi lain, pada tahun 2018 - 2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "defisit" atau merugi. Artinya, meskipun komponen ekspor berkontribusi cukup besar, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen

^{**)} Angka Sangat Sementara

pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi lebih besar, yang menyebabkan net ekspor bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

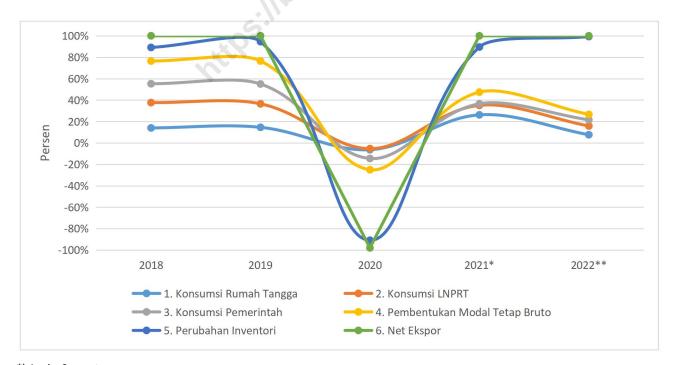
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,

Kota Batu 2018 – 2022(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,32	4,91	-3,92	4,60	6,64
2. Konsumsi LNPRT	7,31	7,41	0,60	1,53	7,12
3. Konsumsi Pemerintah	5,44	6,26	-5,56	0,25	4,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,56	7,25	-6,52	2,05	4,40
5. Perubahan Inventori	-	Ġ	-	-	-
6. Net Ekspor	-	05°-	-	-	-
PDRB	6,50	6,51	-6,46	4,04	6,18

^{*)} Angka Sementara

Grafik 3.5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018-2022 (%)



^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.4, selama periode tahun 2018 - 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Batu selalu mengalami pertumbuhan positif dengan kisaran 6 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian turun drastis hingga -6,46 persen. Kemudian, ekonomi mulai tumbuh lagi pada tahun 2021 hingga 4,40 persen dan pada tahun 2022 seiring dengan makin melandainya pandemi Covid 19 kondisi perekonomian Kota Batu juga semakin membaik hingga tumbuh mencapai 6,18 persen. Sedangkan dari Grafik 3.5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 2.5 dan 2.6 akan terlihat perubahan harga yang terjadi selama periode tahun 2018 - 2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	140,15	143,62	143,79	148,46	155,94
2. Konsumsi LNPRT	183,22	187,19	189,80	192,56	203,11
3. Konsumsi Pemerintah	157,72	161,57	152,49	159,74	153,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,94	142,44	144,40	147,68	154,06
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	141,34	143,59	144,36	146,81	152,60

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.6. Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Batu 2018 – 2022(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,09	2,47	0,12	3,25	5,04
2. Konsumsi LNPRT	5,10	2,17	1,39	1,46	5,48
3. Konsumsi Pemerintah	2,32	2,44	-5,62	4,75	-4,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,38	1,78	1,38	2,27	4,32
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	3,13	1,59	0,53	1,70	3,94

^{*)} Angka Sementara

3.2

Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Batu untuk periode 2018 - 2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Batu, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Batu maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir *(final consumer)* atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus

^{**)} Angka Sangat Sementara

(seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018 – 2022pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga cenderung mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, namun pada tahun 2022 nominal pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi akibat sudah dibukanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penularan COVID-19 sehingga masyarakat sudah bebas beraktivitas di luar rumah, termasuk aktivitas rekreasi dan hiburan.

Tabel 3.7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga, Kota Batu 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	9.841,54	10.580,16	10.177,26	10.990,83	12.311,31
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.021,98	7.366,81	7.077,87	7.403,29	7.894,72
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	62,92	62,51	63,94	65,26	66,23
Rata-rata konsumsi per Kapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	47.824	50.991	47.708	51.202	56.803
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	32.995,40	34.122,37	33.222,24	34.489,58	36.425,68
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT (%)	4,32	4,91	-3,92	4,60	6,64
b. Perkapita (%)	4,61	3,42	-2,64	3,81	5,62
Jumlah penduduk (orang)	205.788	207.490	213.046	214.653	216.735

^{*)} Angka Sementara

Selama periode 2018 – 2022 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung meningkat menjadi 62,92 persen (2018) , 62,51persen (2019), 63,94 persen (2020), 64,54

^{**)} Angka Sangat Sementara

persen (2021) dan pada tahun 2022 sudah mencapai 66,23 persen . Peningkatan proporsi yang terjadi pada 2 tahun terakhir disebabkan karena menurunnya konsumsi pada kategori lain, sehingga proporsi konsumsi rumah tangga meningkat.

Secara umum, pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Pada kondisi normal, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukan rata- rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).

Pada tahun 2018 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,32 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 4,91 persen (2019); -3,92 persen (2020); 4,60 persen (2021) dan 6,64 persen (2022). Sementara itu rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 4,61 persen (2018); 3,42 persen (2019); -2,64 persen (2020); 3,81 persen (2021); dan 5,62 persen (2022). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi "riil" rumah tangga pada tahun 2018-2022 lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 1 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara pada tahun 2020, terjadi penurunan konsumsi perkapita sebesar -2,56 persen meskipun pada tahun tersebut peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,67 persen. Hal tersebut mengindikasikan pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi peningkatan konsumsi perkapita sebesar 3,81 persen dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan konsumsi perkapita sebesar 5,62 persen, hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan pertumbuhan tertinggi pada komoditi hotel dan restoran yang mengalami peningkatan harga sebesar 10,91 persen pada tahun 2022.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 335,37 miliar rupiah, kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu 368,03 miliar rupiah (2019), 375,39 miliar rupiah (2020), 386,68 miliar rupiah (2021) dan 436,90 (2022). Adapun pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah, 7,31persen (2018), 7,41 persen (2019), 0,60 persen (2020), 1,53 persen (2021), dan 7,12 persen (2022). Pertumbuhan pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Rendahnya pertumbuhan konsumsi LNPRT pada tahun 2020 selain karena tidak adanya agenda politik besar pada tahun tersebut, juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kota Batu 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	335,37	368,03	375,39	386,68	436,90
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	183,04	196,60	197,78	200,81	215,10
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,14	2,17	2,36	2,30	2,35
Pertumbuhan (ADHK 2010)	7,31	7,41	0,60	1,53	7,12

^{*)} Angka Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang

^{**)} Angka Sangat Sementara

dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.9 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Batu 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah			, ,		
a. ADHB (Miliar Rp)	1.267,82	1.379,98	1.230,09	1.291.82	1.301,82
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	803,83	854,12	806,67	808.69	849,05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,25	8,11	7,73	7.67	7,00
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu	Rp)				
a. ADHB	6.160,79	6.650,82	5.773,82	6.018,18	6.006,51
b. ADHK 2010	3.906,11	4.116,43	3.786,36	3.767,43	3.917,46
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pen	nerintah (Ribu	Rp)			
a. ADHB	390.939,41	421.367,42	375.601,23	419.967,36	427.106,30
b. ADHK 2010	247.866,39	260.799,39	246.310,96	276.024,07	278.559,71
Pertumbuhan	0,45	0,51	-5,56	12,06	5,95

^{*)} Angka Sementara

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan selama tahun 2018 hingga tahun 2022, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi akhir pemerintah sebagai imbas dari penghematan anggaran yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 1.267,82 miliar rupiah, kemudian meningkat setiap tahun meningkat menjadi 1.379,98 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nominalnya mengalami penurunan menjadi 1.230,09 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 1.301,82 miliar rupiah.

^{**)} Angka Sangat Sementara

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2010, yang juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pengetatan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan mencapai 849,05 miliar rupiah untuk konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan.

Penurunan secara nominal berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan diikuti oleh penurunan peranan dalam perekonomian Kota Batu, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap P Persentase konsumsi pemerintah menurun dari 8,25 persen pada tahun 2018 kemudian cenderung menurun setiap tahun hingga mencapai 8,11 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2022 hanya mencapai 7,00 persen..

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 6,160,79 ribu rupiah, dan meningkat pada dua tahun setelahnya, hingga mencapai 6.650,82 ribu rupiah pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 5.773,82 ribu rupiah dan 6.006,51 ribu rupiah pada tahun 2022.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga menunjukkan adanya pola yang hampir sama, dengan masing-masing tahun senilai 3.906,11 ribu rupiah (2018); 4.116,43 ribu rupiah (2019); kemudian turun cukup dalam menjadi 3.786,36 ribu rupiah pada tahun 2020 dan 3.767,45 ribu rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah mencapai 3.917,46 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 390.939,41 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 421.367,42 ribu rupiah (2019); 375.601,23 ribu rupiah (2020); dan meningkat menjadi 419.967.36 ribu rupiah pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 427.106,30 ribu rupiah. Adapun jika dinilai dengan harga konstan 2010, nominalnya menunjukkan penurunan pada tahun 2020, artinya kenaikan konsumsi pemerintah per pegawai pada tahun 2020 lebih dipengaruhi oleh adanya kenaikan biaya.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik).

Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 3.10 Perkembangan dan Struktur PMTB, Kota Batu 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.948,72	5.401,97	5.119,69	5.343,21	5.819,13
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.536,25	3.792,58	3.545,43	3.618,03	3.777,16

^{*)} Angka Sementara

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 bervariasi antara 2 hingga 7 persen. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sekitar 7,25 persen, hal ini disebabkan oleh pada saat itu banyak investor yang menanamkan modalnya di Kota Batu sehingga terjadi banyak pembangunan asset baik berupa bangunan maupun non bangunan. Sementara pada tahun 2020, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan sebesar -6,52 persen karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan pembangunan yang ditunda sementara waktu. Pada tahun berikutnya pertumbuhan menunjukkan nilai positif meskipun masih kecil yaityu mencapai 4,40 persen pada tahun 2022 yang berarti kondisi mulai adanya kegiatan pembangunan asset baik berupa bangunan maupun non bangunan.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan

^{**)} Angka Sangat Sementara

barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.11 Perkembangan Perubahan Inventori Kota Batu 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	0,71	0,76	0,46	0,51	0,86
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	0,68	0,72	0,43	0,45	0,75
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} Angka Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan lebih rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Selama tahun 2017, terjadi perubahan inventori Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 0,65 miliar rupiah, yang kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan perubahan inventori yang terus bernilai positif, dimana masing-masing 0,71 miliar rupiah selama tahun 2018; 0,76 miliar rupiah selama tahun 2019; 0,46 miliar rupiah selama tahun 2020; dan 0,51 miliar rupiah selama tahun 2021. Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Batu cenderung stabil.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Batu, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten/kota lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Sementara transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk

^{**)} Angka Sangat Sementara

pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Batu di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Batu terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Net ekspor barang dan jasa didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor berbagai produk barang dan jasa. Karenanya, komponen ini secara implisit mencakup kedua unsur pokok, yaitu: ekspor dan impor. Sama halnya dengan perubahan inventori, hasil dari net ekspor juga dapat memiliki 2 (dua) tanda, positif dan negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor lebih besar dari pada impor, demikian pula sebaliknya.

Tabel 3.12 Perkembangan Net Ekspor, Kota Batu 2018 - 2022

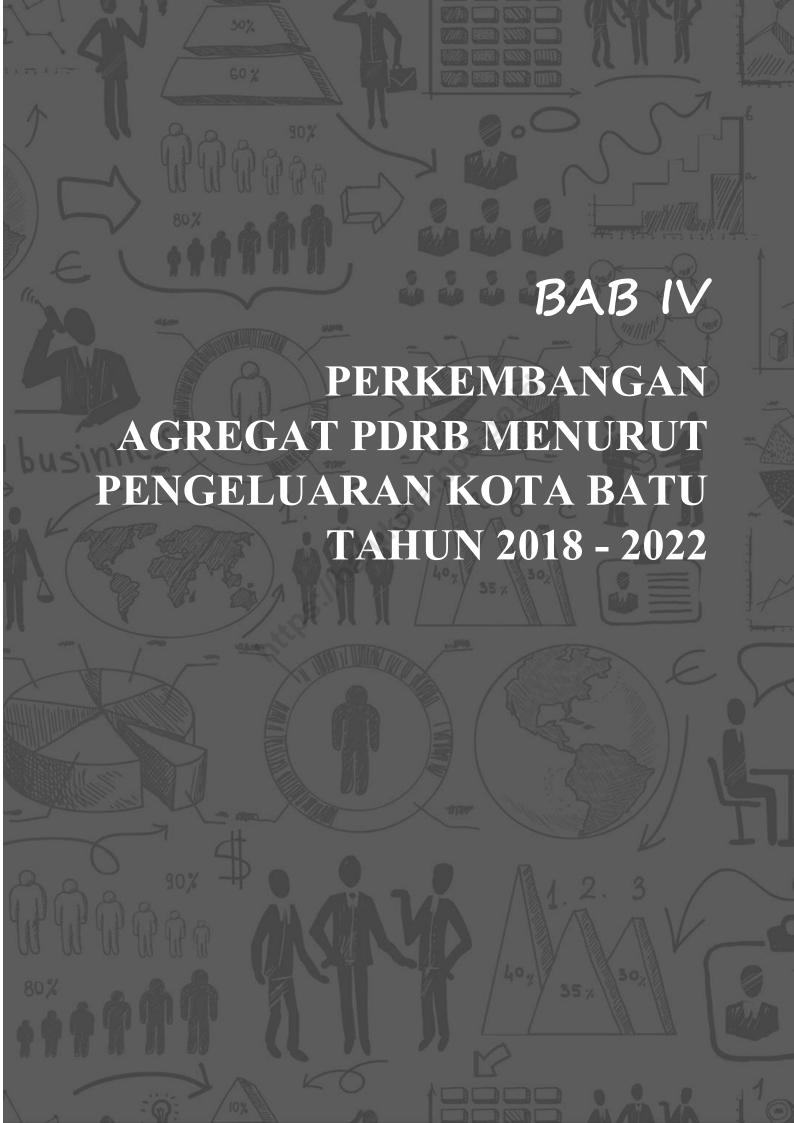
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor		10.			
a. ADHB (Miliar Rp)	-753,27	-805,91	-986,10	-1.171,93	-1.282,42
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-479,79	-424,17	-602,36	-559,85	-555,86

^{*)} Angka Sementara

Kontribusi net ekspor dalam kurun waktu 2018 - 2022 selalu bernilai negatif, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Hal ini menunjukkan nilai impor lebih besar dari pada nilai ekspornya. Dengan perkataan lain, perdagangan antar wilayah di Kota Batu dengan wilayah-wilayah lain masih selalu mengalami defisit setiap tahun. Pada tahun 2018, defisit net ekspor sekitar 753,27 miliar rupiah. Angka ini kemudian naik menjadi 805,91 miliar rupiah pada 2019, kemudian mengalami peningkatan pada 2020 menjadi sebesar 986,10 miliar rupiah. Hal ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai defisit 1.171,93 miliar rupiah dan puncaknya mencapai defisit 1.282,42 miliar rupiah pada 2022.

Meningkatnya defisit net ekspor yang terjadi terutama pada tahun 2021 dan 2022 secara umum dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung turun drastis, sehingga ekspor jasa pariwisata, akomodasi, dan produk buah tangan khas Kota Batu menjadi terganggu. Disisi lain, dalam rangka penanganan COVID-19 tentu Kota Batu membutuhkan beberapa produk/jasa yang tidak diproduksi di Kota Batu, seperti masker, *hand sanitizer*, dan lain- lain. Sehingga hal tersebut semakin meningkatkan nilai impor Kota Batu.

^{**)} Angka Sangat Sementara



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1

PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Batu, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kota Batu 2017 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	15.640,89	16.924,99	15.916,80	16.841,14	18.587,60
- ADHK 2010	11.065,99	11.786,65	11.025,81	11.471,43	12.180,93
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	76.004,87	81.570,15	74.710,62	78.457,53	85.761,88
- ADHK 2010	53.773,73	56.805,87	51.753,21	53.441,76	56.201,95
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	6,50	6,51	-6,46	4,04	6,18
Jumlah penduduk (orang)	205.788	207.490	213.046	214.653	216.735

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

4.2

Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbedadalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kota Batu 2017 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rupiah)			6		
a. Rumah tangga	9.841,54	10.580,16	10.177,26	10.990,83	12.311,31
b. LNPRT	335,37	368,03	375,39	386,68	436,90
c. Pemerintah	1.267,82	1.379,98	1.230,09	1.291,82	1.301,82
Jumlah	11.444,73	12.328,17	11.782,74	12.669,34	14.050,03
PDRB ADHB (Miliar Rp)	15.640,89	16.924,99	15.916,80	16.841,14	18.587,60
Proporsi	73,17	72,84	74,03	75,23	75,59

^{*)} Angka Sementara

4.3

Incremental Capital Output (ICOR)

Incremental Capital Output (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

^{**)} Angka Sangat Sementara

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

 Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

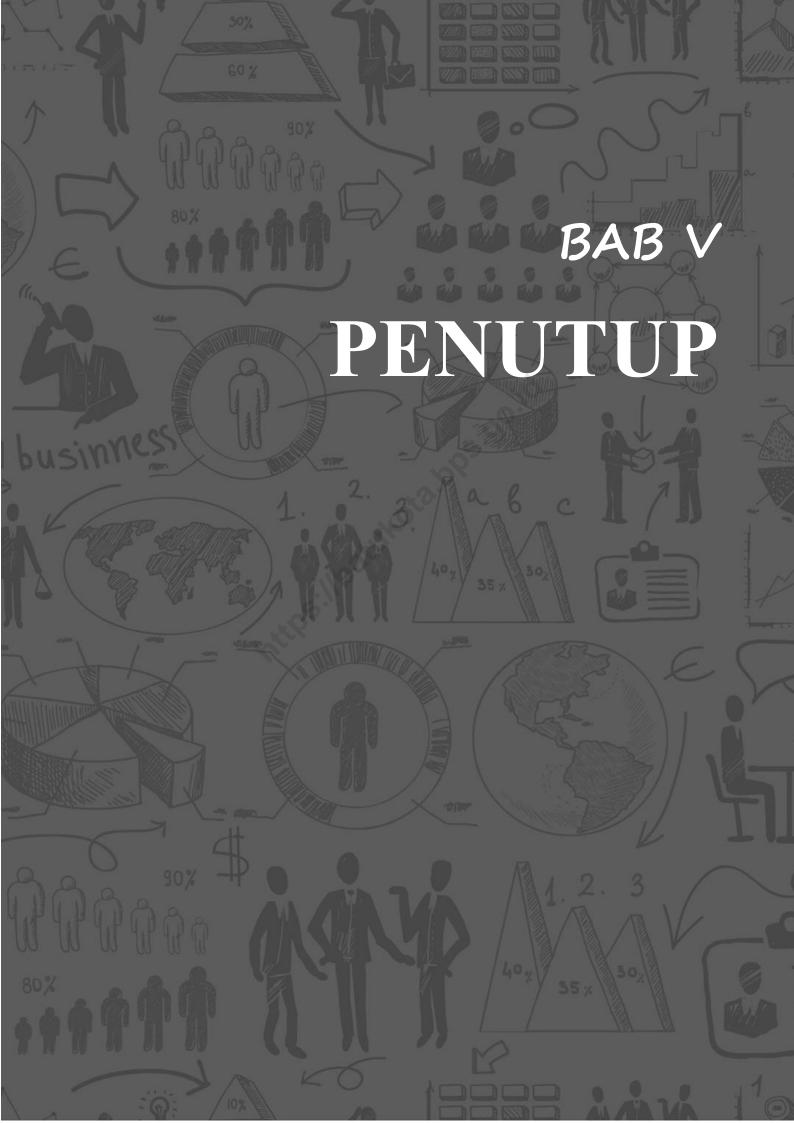
Tabel 4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kota Batu 2017 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	11.065,99	11.786,65	11.025,81	11.471,43	12.180,93
Perubahan (miliar rupiah)	675,14	720,66	-760,84	445,62	709,50
PMTB ADHK 2010 (miliar Rp)	3.536,25	3.792,58	3.545,43	3.618,03	3.777,16
ICOR	5,24	5,26	-4,66	8,12	5,32

^{*)} Angka Sementara

Dari Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai ICOR di Kota Batu tahun 2019 mencapai 5,26. Artinya, setiap penambahan kapital sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan output perekonomian sebesar 5,26 miliar rupiah. Akan tetapi pada tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19 yg terjadi sejak pertengahan Maret 2020, menanamkan modal akan tidak menguntungkan bagi investor. Hal ini terlihat pada Tabel 4.3 bahwa meskipun terjadi penambahan PMTB sebesar 3.551,30 miliar rupiah, output yg dihasilkan justru berkurang -760,84 miliar rupiah. Hal ini berarti, pada tahun 2022 nilai ICOR positif yaitu mencapai 5,32 menunjukkan penambahan kapital sebesar 1 miliar rupiah, tentunya akan meningkatkan output perekonomian sebesar 5,32 miliar rupiah.

^{**)} Angka Sangat Sementara



- 1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Batu pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- 2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- 3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series data* dari tahun 2018 s.d 2022, sehingga mudah untuk menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi dalam selang waktu. Masing- masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- 4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
- 5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Batu terhadap ekonomi luar daerah.



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,

Kota Batu Tahun 2018 – 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Г	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	9.841.542,75	10.580.159,49	10.177.262,47	10.990.833,90	12.311.308,48
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	335.370,31	368.028,74	375.389,32	386.682,14	436.897,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.267.816,50	1.379.978,31	1.230.093,99	1.291.819,59	1.301.822,45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.948.715,25	5.401.968,26	5.119.692,46	5.343.208,81	5.819.130,43
5	Perubahan Inventori	714,12	764,32	464,54	527,10	861,65
6	Net Ekspor	-753.268,77	-805.907,93	-986.104,01	-1.171.927,56	-1.282,42
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	15.640.890,16	16.924.991,20	15.916.798,76	16.841.143,98	18.587.601,95

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010=100 Menurut Pengeluaran,

Kota Batu Tahun 2018 - 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	7.021.975,07	7.366.806,25	7.077.866,57	7.403.291,94	7.894.722,49
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183.041,68	196.604,27	197.783,09	200.809,56	215.099,92
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	803.830,69	854.117,99	806.668,39	808.694,14	849.050,05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.536.254,45	3.792.579,00	3.545.426,10	3.618.029,14	3.777.157,25
5	Perubahan Inventori	675,39	716,65	430,52	461,81	754,02
6	Net Ekspor	-479.788,20	-424.174,33	-602.360,7	-559.852,08	-555.855,9
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	11.065.989,09	11.786.649,83	11.025.813,97	11.471.434,51	12.180.927,83

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 - 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,92	62,51	63,94	65,26	66,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,14	2,17	2,36	2,30	2,35
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,11	8,15	7,73	7,67	7,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,64	31,92	32,17	31,73	31,31
5	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Net Ekspor	-4,82	-4,76	-6,20	-6,95	-6,90
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran,

Kota Batu Tahun 2018 – 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,32	4,91	-3,92	4,60	6,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,31	7,41	0,60	1,53	7,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,44	6,26	-5,56	0,25	4,99
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,56	7,25	-6,52	2,05	4,40
5	Perubahan Inventori	NO.	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	6,50	6,51	-6,46	4,04	6,18

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran,

Kota Batu Tahun 2018 – 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	140,15	143,62	143,79	148,46	155,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183,22	187,19	189,80	192,56	203,11
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	157,72	161,57	152,49	159,74	153,33
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,94	142,44	144,40	147,68	154,06
5	Perubahan Inventori	O ^x O	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	141,34	143,59	144,36	146,81	152,60

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto MenurutPengeluaran, Kota Batu Tahun 2018 - 2022

	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,09	2,47	0,12	3,25,	5,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,10	2,17	1,39	1,46	5,48
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,32	2,44	-5,62	4,75	-4,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,38	1,78	1,38	2,27	4,32
5	Perubahan Inventori	<u>o.</u> -	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB (1+2+3+4+5+6)	3,13	1,59	0,53	1,70	3,94

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

DATA MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU

Jalan Melati No. 11, Songgokerto - Batu, Telp. - Fax: (0341) 512575 e-mail: bps3579@bps.go.id, website: batukota.bps.go.id